

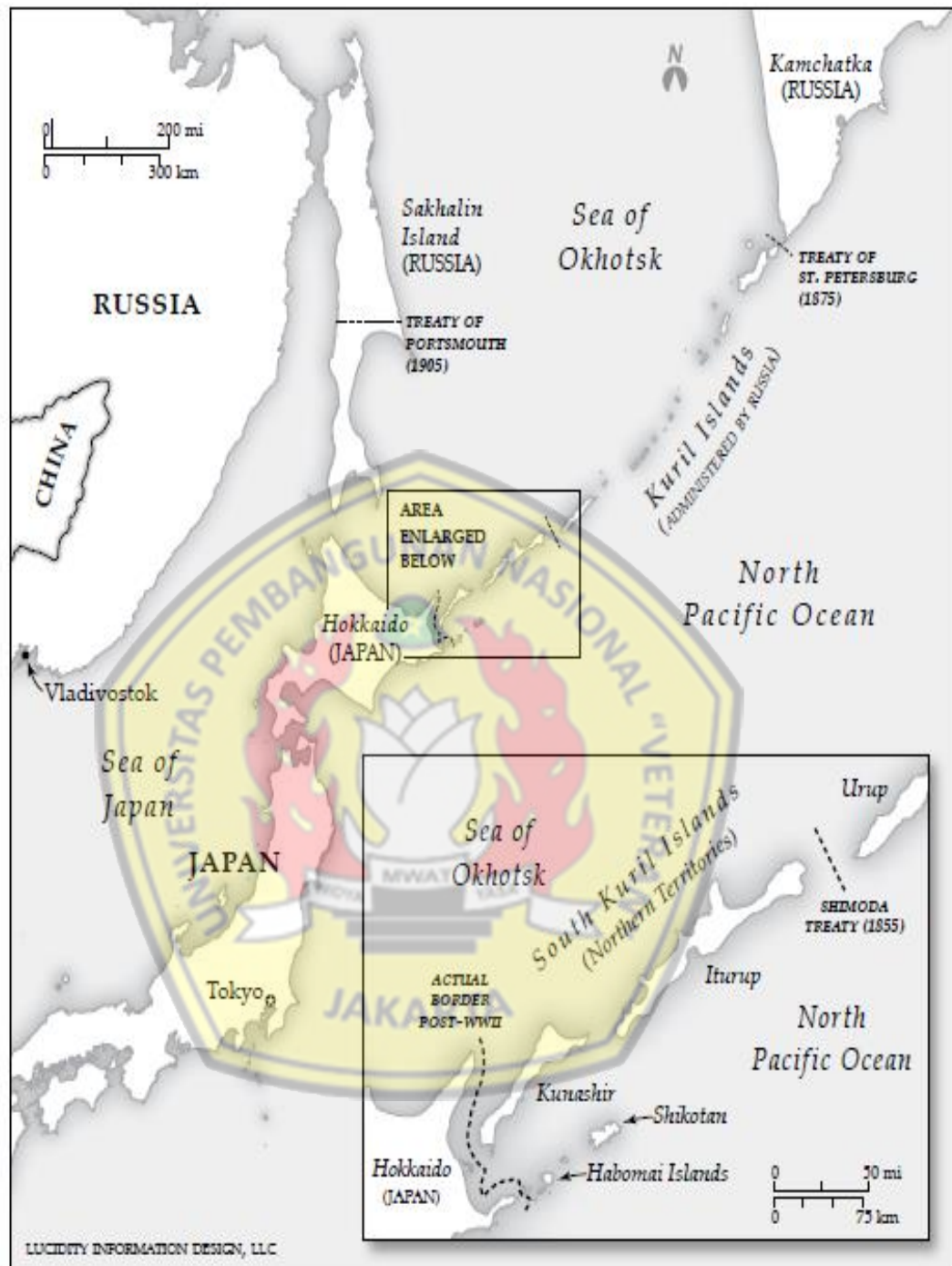
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Letak geografis kepulauan Kuril berada dari membentang ke arah timur laut dari Hokkaido Jepang hingga semenanjung Kamchatka yang memisahkan laut Okhotsk dari Samudra Pasifik Utara. Meliputi wilayah kurang lebih 15.600 km² dan memiliki panjang pantai 2409 km (Pietsch 2003, hlm1299). Keempat pulau itu adalah bagian dari Oblast Sakhalin di Rusia. Di Jepang ke empat pulau itu dikenal sebagai Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai yang berasal dari dialek penduduk asli suku Ainu. Kepulauan Kuril telah dihuni lama oleh suku Ainu hingga mereka diusir dari bagian paling utara oleh Rusia pada abad ke-18. Jepang menguasai wilayah ini sejak 1875 berdasarkan pakta Saint Petersburg dengan syarat harus menyerahkan Sakhalin kepada Rusia. Rusiamemperoleh kembali kepulauan Kuril setelah perang dunia II (pakta San Francisco), tetapi Jepang hingga kini mengklaim empat pulau yang letaknya dibagian paling selatan dinamakan 'Wilayah Utara' di Jepang. (Trenin n.d.,hlm 5)

Pulau Kuril dinyatakan memiliki potensi akan kandungan kekayaan laut yang melimpah serta ditemukannya sumber daya alam yang belum dieksplorasi seperti minyak bumi dan gas alam serta emas dan perak. Pulau Kuril juga memiliki banyak pegunungan berapi dan menjadi salah satu objek wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan dunia (Trenin n.d.,hlm 5). Memiliki letak geografis yang sangat strategis dalam hal pertahanan Rusia serta jarak yang berdekatan dengan Jepang sehingga menjadi sebuah ancaman bagi Jepang dan kepulauan tersebut masuk kedalam ZEE Jepang. Hal ini yang menjadi penyebab utama persengketaan antara Jepang dan Rusia terhadap kepulauan Kuril.



Sumber: Carnegie Moscow Center

Gambar 1 Peta Sengketa Kepulauan Kuril

Perjanjian Shimoda 1855 adalah perjanjian resmi pertama Rusia-Jepang mengenai status Sakhalin dan kepulauan Kuril. Pasal 2 Perjanjian Shimoda yang

menjelaskan perjanjian mengenai perbatasan, mencantumkan "Mulai sekarang, perbatasan kedua negara ditetapkan berdasarkan letak antara Pulau Etorofu dan Pulau Uruppu (Schoenbaum 2008, hlm.120). Seluruh Pulau Etorofu merupakan milik Jepang dan kepulauan Kuril, yang berada di utara dan termasuk didalamnya Pulau Uruppu merupakan milik Rusia." Pulau-pulau seperti Kunashiri, Shikotan, dan kepulauan Habomai yang berada di selatan Etorofu tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian, dan dimaksudkan pada waktu itu sebagai wilayah teritorial Jepang yang tidak dalam persengketa (Schoenbaum 2008, hlm.121). Perjanjian Shimoda juga mencantumkan Pulau Sakhalin/Karafuto tidak untuk dibagi dua melainkan berada dibawah pengawasan bersama Rusia-Jepang.

Pada tanggal 8 September 1951 Jepang menandatangani perjanjian San Fransisco yang memuat pasal-pasal yang menunjukkan tanggung jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan. Didalam perjanjian tersebut juga tertuang pasal mengenai wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal. Dampak dari perjanjian tersebut adalah pernyataan bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap kepulauan Kuril. Dan perjanjian tersebut juga mengakui kedaulatan Rusia atas kepulauan Kuril. Rusia tetap mempertahankan kedaulatan atas kepulauan-kepulauan tersebut dan diakui dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir perang dunia ke II (Schoenbaum 2008, hlm. 279).

Permasalahan yang telah terjadi selama hampir 65 tahun tersebut berdampak terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan Rusia. Selama masa tersebut kedua negara melakukan konfrontasi yang mengakibatkan konflik ini terus berlangsung hingga mencapai puncaknya pada tahun 2007 yang ditandai dengan sebuah kapal patroli Rusia melepaskan tembakan kepada nelayan Jepang dikawasan kepulauan tersebut dengan alasan bahwa nelayan tersebut telah memasuki wilayah yuridiksi Rusia. Jepang menyerukan agar Rusia meminta maaf atas insiden tersebut dan pada tahun yang sama membentuk *Japan Ministry of Defense* serta mengintensifkan kerjasama dengan Amerika Serikat atau *Japan-US Security Arrangement* yang terdapat dalam buku putih pertahanan Jepang dalam hal perthanan dan modernisasi kekuatan militer Jepang (Di hankam.kompasiana.com, 29 Oktober 2014).

Namun pada tahun 2010 justru Rusia melakukan penambahan kekuatan militer dikawasan tersebut. Presiden Rusia Dmitri Medveded pada masa pemerintahannya melakukan kunjungan ke wilayah kepulauan tersebut dan Jepang beranggapan bahwa kunjungan tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk provokasi dari Rusia yang kemudian Jepang melakukan penarikan duta besar dari Rusia dan memprotes keras kedutaan Rusia di Jepang (Di lejournalinternational.fr, 25 Oktober 2014). Pada tahun 2011 Amerika Serikat memberikan izin kepada Jepang untuk kembali mengklaim kepulauan Kuril sebagai milik kedaulatan Jepang setelah sebelumnya tidak diizinkan karena adanya perjanjian San Francisco. Setelah adanya rapat *security consultations* antara Jepang dan Amerika Serikat Jepang melihat kepulauan Kuril menjadi sebuah ancaman baginya karena jaraknya yang terlalu berdekatan dengan Rusia. Sedangkan Rusia tetap mempertahankan status *quo* di kepulauan Kuril berdasarkan perjanjian pasca perang dingin sehingga hubungan bilateral antara kedua negara ini semakin memanas (Di thediplomat.com, 1 November 2014). Pada tahun 2012 pemerintah Jepang kembali menegaskan tidak akan berdamai dengan Rusia. Ancaman itu dilontarkan Jepang jika Rusia tidak segera mengembalikan kepulauan Kuril selatan yang disengketakan.

Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda dalam rapat parlemen mengatakan bahwa Tokyo tidak akan setuju jika Rusia hanya mengembalikan satu pulau saja. "Tokyo menginginkan keempat pulau yang diklaim sebagai wilayah teritorial Rusia dikembalikan" pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah pernyataan yang bernada provokatif dengan menyebut bahwa Rusia menduduki pulau tersebut secara ilegal. Jepang menuding Rusia menduduki pulau-pulau yang disengketakan tanpa ada dasar hukum. (Di ns1.kompas.web.id, 25 Oktober 2014). Namun Rusia tetap mengklaim, kepulauan tersebut sebagai wilayahnya setelah Uni Soviet menduduki pulau-pulau yang disengketakan dalam Operasi Ofensif Strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada dibawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan Oblast Sakhalin. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Jepang dan pihak Sekutu. Kesepakatan perjanjian San Francisco tahun 1951 Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap kepulauan Kuril.

I.2 Rumusan Masalah

Rusia sebagai salah satu negara pemenang perang dunia II telah mendapatkan pengakuan bahwa seluruh kepulauan Kuril telah menjadi milik Rusia dan merupakan kedaulatannya. Namun Jepang tetap bersikeras bahwa keempat kepulauan Kuril yaitu Kunashir, Shikotan, Iturup dan Habomai merupakan milik Jepang dan tidak termasuk didalam perjanjian San Fransico tahun 1951 dan menggunakan hasil perjanjian Konferensi Yalta sebagai dasar hukumnyayang seharusnya sudah menjadi kepemilikan Rusia seluruhnya atas kepulauan Kuril. Di tahun 2012 Jepang kembali melakukan klaim terhadap kepulauan Kuril yang dipersengketakan dengan Rusia dimana Jepang telah diizinkan lagi untuk kembali mengklaim kepulauan tersebut oleh Amerika Serikat sehingga pada tahun 2014 Rusia melakukan peningkatan kekuatan dikepulauan yang diklaim Jepang sebagai salah satu tindakan Rusiadalam mempertahankan kepulauan tersebut. Dalam latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu: **“BagaimanaStrategi Rusia Dalam Menjaga Wilayah Kepulauan Kuril Terkait Sengketa Dengan Jepang 2012-2014 ?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menjelaskan dan menganalisa mengenai kasus persengketaan kepulauan Kuril serta strategi Rusia dalam mempertahankan kedaulatan di kepulauan Kuril dari klaim Jepang.
- b. Memperoleh pengetahuan tentang sejarah dan awal mula terjadinya kasus persengketaan kepulauan Kuril yang tidak pernah selesai.
- c. Mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh Rusia dan hasil dalam penyelesaian kasus sengketa tersebut dan mempertahankannya

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan data dan pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan kasus persengketaan antara negara
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan strategi pertahanan Rusia dan kasus sengketa antar negara.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan strategi pertahanan Rusia dalam menjaga wilayah kepulauan Kuril (sengketa dengan Jepang)

I.5.1 Sengketa Kepulauan Kuril

Donny Tanaka Silalahi, *Sengketa Pulau Kuril Antara Russia Dan Jepang Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Didalam jurnal ini penyelesaian sengketa kepulauan Kuril lebih fokus berdasarkan dengan hukum internasional pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan berdasarkan empat konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Namun demikian pada kisaran tahun 1970-an konvensi tersebut mulai dianggap tidak lagi memadai dan muncul tuntutan untuk meninjau kembali isi konvensi tersebut. Konflik kepemilikan pulau Kuril antara Rusia dan Jepang, kepulauan Kuril diambil alih oleh Uni Soviet (nama lama Rusia) antara 28 Agustus hingga 5 September 1945, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus. Pada 1951 perjanjian keamanan San Francisco menyatakan bahwa Jepang harus menyerahkan semua klaimnya atas kepulauan Kuril ke sekutu. Perjanjian ini juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet. Jadi tuntutan Uni Soviet atas kepulauan Kuril juga tidak terjadi. Uni Soviet akhirnya menggunakan hasil perjanjian Konferensi Yalta sebagai dasar hukumnya.

Penyelesaian sengketa pulau Kuril menurut hukum internasional, penyelesaian sengketa pulau Kuril antara Jepang dan Rusia didasarkan pada hukum internasional dan prinsip yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pulau yang diklaim oleh Jepang, solusi-solusi tersebut antara lain Arbitrase, penyelesaian melalui jalur diplomasi, mahkamah internasional, penyelesaian melalui Referendum. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya, Jepang juga tidak terlepas dari permasalahan perbatasan dengan negara lain. Jepang akan melakukan tindakan apapun dalam mempertahankan wilayahnya. Salah satu contoh upaya keras Jepang yakni dalam hal menjaga keutuhan wilayahnya adalah terjadinya konflik wilayah perbatasan Jepang dengan Rusia tentang kepulauan Kuril. Konflik tersebut merupakan persengketaan antara Jepang dan Rusia atas kedaulatan kepulauan Kuril selatan. Pulau-pulau yang disengketakan adalah pulau yang masuk dalam operasi ofensif strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada dibawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Oblast Sakhalin. Namun, diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut Teritorial Utara, atau Chishima Selatan, dibawah administrasi sub-prefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido.

Pada kasus sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang terhadap pulau Kuril, Russia menginginkan hubungan yang normal diantara dua negara didalam mencapai kepentingan masing-masing termasuk perjanjian perdamaian berdasarkan hukum dan keadilan. Pada sengketa pulau Kuril ini disamping adanya suatu negosiasi untuk menyelesaikan sengketa wilayah, juga adanya kerjasama ekonomi dari kedua belah pihak berdasarkan kebijakan dari Jepang sendiri yaitu adanya negosiasi yang berkelanjutan dan juga pembangunan secara ekonomi, kemanusiaan serta teknologi. Namun hal ini tidak terlepas dari kepentingan Rusiayang ingin memperbaiki kondisi ekonominya setelah perang dingin berakhir. Adanya perbedaan pendapat antara pemerintah yang mana lebih menitik beratkan kepada kerjasama ekonomi seiring dengan jalannya proses negosiasi, lain hal dengan kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat dimana lebih menitikberatkan kepada kedaulatan negara.

Mereka berpendapat bahwa penyelesaian sengketa wilayah tersebut harus diselesaikan dengan keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan negosiasi, serta tidak akan mendukung hasil dari penyelesaian sengketa tersebut jika Rusia harus kehilangan sebagian wilayahnya. Rusia menggunakan hukum untuk mengklaim kedaulatan atas kepulauan Kuril, dan menurut mereka ini ditentukan oleh hasil dalam Perang Dunia II. Kementerian luar negeri Rusia menegaskan, argumentasi apa pun yang meragukan kepemilikan Rusia terhadap kepulauan Kuril adalah tidak bisa diterima. Sebelumnya kepala sekretariat kabinet Jepang menyatakan, kabinet Shinzo Abe akan mempertahankan prinsip semula tentang status daerah yang disebut oleh Jepang sebagai empat pulau utara itu, dan akan menanganinya dengan sikap fleksibel. Dalam jurnal ini lebih membahas tentang hukum internasional sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah sengketa kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia dengan berpedoman ke PBB dan lebih berfokus kepada Jepang saya akan menjabarkan tentang strategi pertahanan Rusia dalam persengketaan kepulauan Kuril tersebut dalam salah satu penyelesaian persengketaan dan tindakan yang dilakukan oleh Rusia.

Sandra Monica, *Strategi Jepang Menghadapi Rusia Terhadap Sengketa Kepulauan Kuril Tahun 2008-2012*. Pertentangan wilayah perbatasan terjadi antara Jepang dan ketiga negara tersebut. Jepang memiliki pertikaian dengan Cina dan Taiwan dalam persoalan Kepulauan Senkaku. Jepang juga mempunyai sengketa dengan negara Korea Selatan dan begitu juga dengan Rusia, Jepang juga mengalami sengketa dengan Rusia dalam persoalan Kepulauan Kuril, dimana persetujuan kedua negara ini terjadi sejak Perang Dunia ke II. Hingga sekarang Pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan Habomai masih berada dalam kekuasaan Rusia. Namun Jepang mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut adalah wilayah teritori Jepang bagian Utara yang telah dijajah oleh Rusia.

I.6 Kerangka Pemikiran

Terkait erat dengan skripsi yang dibahas ini maka untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Strategi Rusia dalam menjaga Kepulauan Kuril terkait kalim Jepang di gunakan teori antara lain :

- a. Konsep Kentingan Nasional
- b. Konsep Sengketa
- c. Teori Geostrategi
- d. Konsep Geostrategi

I.6.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tersusun dari unsur-unsur kebutuhan pokok negara yaitu pemeliharaan diri yang berarti kemampuan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk menjaga eksistensi atau kelangsungan hidup, kemerdekaan berarti bebas menentukan nasib sendiri, terbebas dari penjajah atau intervensi asing, integritas wilayah yang berarti memiliki persatuan wilayah, keamanan militer yang berarti kemampuan yang dimiliki suatu negara untuk dapat melindungi dirinya dari adanya ancaman dari luar, serta kekuatan ekonomi yang merupakan kebutuhan pokok suatu negara.

Setiap negara bangsa mempunyai cara-cara yang berbeda untuk mewujudkan kemampuan minimal negaranya dan masing-masing memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam beberapa hal fisik, politik dan kulturalnya, sehingga salah satu kepentingannya akan menonjol dari yang lain. Baik dalam segi pertahanan maupun ekonomi. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional dari seluruh sistem nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri, dimana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategis untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara (Dahlan 1983, hlm.23).

I.6.2 Konsep Sengketa

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara. Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa internasional dapat menyangkut banyak hal. Menyangkut substansi sengketa itu, beberapa pakar mencoba untuk memisahkan antara sengketa hukum (legal dispute) dengan sengketa politik (political dispute) (Di negarahukum.com 31 Oktober 2014). Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam sengketa internasional dalam penyelesaiannya memiliki banyak jalur. Baik itu jalur damai ataupun melalui jalur kekerasan. Penyelesaian melalui jalur damai terbagi dua yaitu melalui jalur politik dan juga melalui jalur hukum seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, pengadilan international. Penyelesaian sengketa dengan cara ini lebih banyak digunakan karena cara ini lebih aman untuk dilakukan dari pada melalui kekerasan.

Jika sengketa tersebut sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalan tersebut maka jalan terakhir adalah penyelesaian sengketa melalui jalur kekerasan atau penyelesaian secara tidak damai yang dapat berupa penggunaan militer, perang, retorsi, blokade, dan lain sebagainya (Sefriani 2010). Jadi bisa disimpulkan bahwa selama masih bersifat perbedaan pendapat, perselisihan, perbedaan kepentingan, pertengkaran antara dua pihak baik itu individu, kelompok maupun negara dikatakan sengketa. Apabila sudah ada agresi, aksi reaksi yang menimbulkan kekerasan antara kedua individu, kelompok, maupun negara itu dikatakan sebagai konflik. Seperti kasus persengketaan kepulauan Kuril antara Rusia dan Jepang yang telah melalui berbagai cara seperti sengketa hukum dan sengketa politik namun masalah persengketaan tersebut tidak terselesaikan.

I.6.3 Teori Geostrategi

Faktor stagnan geografi menjadi sebuah hal yang menentukan dan mempengaruhi keluaran kapabilitas politik luar negeri yang menyesuaikan dengan kondisi geografisnya. Geogstrategi menjelaskan bahwa bagaimana respon sebuah negara dalam mengupayakan peranan militer dan diplomasinya untuk melindungi dan mendapatkan sumber-sumber terbatas tersebut. Respon tersebut sebagai upaya untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh dan arah kebijakan luar negri sebuah negara (Gyrgiel 2006, hlm.22). Sedikit penjelasan mengenai geografi, geopolitik dan geostrategis. Geografi adalah realitas fisik, laut, sungai dan hal lainnya mengenai geologi bumi. Geopolitik merupakan faktor manusia didalam geografi tersebut, menetapkan nilai sesuai dengan kepentingan strategis mereka, dalam hal ini tentunya apa yang dilakukan manusia didalamnya mengenai lingkungan strategis mereka, yang mungkin akan terus berubah tergantung dengan kondisi geografi mereka, seperti penemuan rute terbaru atau hal lainnya, yang tentunya tidak tetap, tapi akan berubah sesuai dengan kondisi geografi, ekonomi dan sumber daya alam.

Sedangkan geostrategis adalah suatu arah dalam kebijakan luar negeri suatu negara dalam melihat apa yang terjadi dalam lingkungan strategis negaranya, yang dimana negara lebih memfokuskan upaya memproyeksikan kekuatan militer atau dengan suatu aktifitas diplomasi langsung. Dimana dorongan ini terjadi dikarenakan oleh kelompok kepentingan, alasan ideologis atau mungkin oleh keinginan dari pemimpin itu sendiri. Strategi sebuah negara dalam memberikan respon terhadap kondisi geografinya, atau bagaimana negara melakukan upaya dalam mengerahkan kegiatannya, seperti pengerahan militer atau dengan cara diplomatik. Variabel yang mempengaruhi geostrategi adalah batas batas Negara. Bagaimana negara melindungi wilayah mereka dari serangan, dan batas batas negara adalah ukuran dalam keamanan wilayah. Ketika batas-batas negara merasa terancam atau tidak stabil, maka negara harus fokus melindungi wilayah mereka, dan tidak dapat mengejar kebijakan luar negeri yang efektif jauh dari wilayah mereka. Jakub menjelaskan dalam bukunya dengan menekankan bahwa keamanan paling penting dan utama adalah menjaga perbatasan nasional.(Gyrgiel 2006, hlm.37)

I.6.4 Konsep Strategi

Dalam konsep strategi yang tidak hanya menjelaskan dalam satu objek tertentu saja. Penggunaan konsep strategi pada masa lampau terfokus pada kajian perang saja. Jika dilihat dari kajian kekuatan militer, strategis menjadi jembatan antara kekuatan militer tersebut dengan pencapaian tujuan politik. Dengan kata lain dianggap “*the use that is made of force and the threat of force the ends of policy*”. Berdasarkan Clausewitz yang mendefinisikan strategi sebagai bentuk “*engagements*” atau tujuan perang. Sehingga, penjelasan definisi strategi selalu mengarah pada hubungan antara kekuatan militer dan tujuan politik. Konsep strategis ini kemudian digunakan sebagai pedoman pengaplikasian kebijakan suatu negara. Colins Gray menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan konsep strategi yang dipetakan ke dalam tiga kategori, yaitu pertama, dimensi strategi dalam kategori *People and Politics* yang terdiri dari orang/individu, masyarakat, materi dan mentalitas, politik dan etika.

Kedua, dimensi strategi dalam kategori *Preparation for War* yang meliputi ekonomi dan logistik, organisasi, administrasi militer, informasi dan inteligensi, doktrin, dan teknologi. Ketiga, dimensi strategi dalam kategori *War Proper* yang terdiri dari operasi militer, pimpinan (dalam politik dan militer), geografi, pergesekan dan lawan. Dimensi-dimensi tersebut merupakan dimensi yang memiliki kontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan dari strategi (Gray 1999, hlm. 17). Maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah jembatan yang menghubungkan antara kekuatan militer dengan tujuan politik, dengan dibantu oleh beberapa dimensi seperti politik, militer, ekonomi dalam mencegah ancaman-ancaman dari luarbaik secara ancaman yang sifatnya diam-diam atau dengan ancaman yang jelas, sehingga strategi itu adalah alat untuk memajukan politik, walaupun tidak dengan strategi militer, tetapi strategi akan tetap ada didalamnya dimana dalam pelaksanaannya akan melihat dimensi dimensi dalam strategi itu sendiri baik

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 2 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi

Bagaimana strategi Rusia dalam mempertahankan kepulauan Kuril sejak kembalinya klaim Jepang di kepulauan tersebut setelah melakukan modernisasi kekuatan militer dan disetujui oleh Amerika Serikat dalam sengketa pulau Kuril

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif juga menggunakan analisis dalam sebuah studi kasus.

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dimana penulis menggunakannya untuk mendapatkan data-data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang

diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi ditingkat nasional maupun internasional seperti buku putih pemerintah. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses membaca, memahami, membandingkan, serta menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dalam media internet serta data-data lainnya terkait dengan penelitian ini.

I.10 Sistematika Penulisan

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada pada penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasionalisasi konsep, asumsi, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II SENGKETA KEPULAUAN KURIL

Bab kedua membahas mengenai kronologis sejarah dan dinamika klaim kepulauan Kuril kemudian perjanjian-perjanjian dan kepentingan kedua negara tentang kepulauan Kuril yang dilakukan Rusia dengan Jepang.

BAB III STRATEGI RUSIA DALAM MENJAGA WILAYAH KEPULAUAN KURIL DARI KLAIM JEPANG

Bab ketiga membahas mengenai strategi apa saja yang dilakukan Rusia untuk mempertahankan kepulauan Kuril dari klaim Jepang pada tahun 2012-2014.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP